

DIGITAL TRANSFORMATION IN PUBLIC SERVICES IN DISPENDUK CAPIL

TRANSFORMASI DIGITAL DALAM PELAYANAN PUBLIK DI DISPENDUK CAPIL

Zaskia Afrina Khaliq¹, Hafidatus Solehah², Lutfiatul Masruroh³, Naufal Hafizh W⁴, Yogie Agung⁵

^{1,2,3,4,5} Program Studi S1 Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Muhammadiyah Jember

Corresponding author: zaskiafrina@gmail.com

Article Information: submission received 15 Januari 2025; revision: 6 May 2025; accepted 20 May 2025; first published online 28 May 2025

Abstrak

To improve the quality of public services, digital transformation has become a top priority, especially at the Population and Civil Registration Office (Dispendukcapil). This sector has utilized information and communication technology (ICT) to accelerate, facilitate, and increase the transparency of population administration services. The purpose of this study is to find the elements that support and hinder digital transformation in the Dispendukcapil, as well as how this has an impact on the quality of public services. Although digital transformation offers great opportunities to improve efficiency and accuracy, limited infrastructure, low digital literacy of society, and resistance to changes in organizational culture are some of the obstacles found based on literature research and data analysis. The results show that increasing digital literacy, central and regional government collaboration, and adequate budget allocation to support digitalization are essential. Technological transformation.

Keywords: Digital transformation, public services, Dispendukcapil, population administration, information and communication technology (ICT), digital innovation.

I. PENDAHULUAN

Transformasi digital dalam pelayanan publik telah menjadi salah satu elemen yang semakin penting dalam meningkatkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas pemerintah adalah transformasi digital dalam pelayanan publik. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispendukcapil) sangat penting untuk memberikan layanan administrasi kependudukan yang cepat dan efisien di tengah perkembangan pesat teknologi informasi dan komunikasi (TIK). Modernisasi layanan publik dengan menggunakan teknologi digital memungkinkan pemerintah untuk membuat solusi inovatif untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang

semakin kompleks, menurut Susilo dan Roesli (2018). Namun, transformasi digital sering dihalangi oleh masalah seperti kekurangan infrastruktur dan budaya organisasi (Syahfitri, Setiawan, & Putri, 2021).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan komponen yang mendukung dan menghambat penerapan transformasi digital di Dispendukcapil serta melihat bagaimana hal itu berdampak pada kualitas pelayanan publik. Transformasi digital memungkinkan peningkatan efisiensi dan peningkatan partisipasi masyarakat melalui akses informasi yang lebih baik (Noviati, 2013). Meskipun demikian, salah satu tantangan utama yang perlu diperhatikan adalah rendahnya literasi digital masyarakat. Untuk mengatasi tantangan ini dan memastikan keberlanjutan program digitalisasi, pendekatan kolaboratif antara pemerintah pusat dan daerah sangat penting (Yani, 2018).

Dalam penelitian ini, strategi transformasi digital dapat diterapkan dengan baik dalam pelayanan publik, khususnya di Dispendukcapil. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan baru tentang faktor-faktor keberhasilan serta saran praktis yang relevan untuk pengembangan kebijakan melalui analisis mendalam data empiris dan tinjauan literatur. Anangkota (2017) menyatakan bahwa kolaborasi yang kuat antara visi strategis dan sumber daya yang memadai diperlukan untuk upaya teknologi untuk memperbaiki sistem pemerintahan. Oleh karena itu, makalah ini tidak hanya memberikan manfaat teoritis, tetapi juga memberikan manfaat praktis untuk proses pengambilan keputusan di sektor publik.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Metode Systematic Literature Review (SLR) adalah pendekatan yang digunakan untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyintesis data dari berbagai penelitian yang relevan. SLR berfungsi untuk merumuskan pertanyaan penelitian yang tepat, mengidentifikasi celah dalam penelitian yang ada, serta memahami kondisi terkini di bidang yang diteliti. Di bawah ini terdapat tabel yang mendukung jurnal kami dengan informasi yang relevan.

| Judul Penelitian | Penulisan (Tahun) | Metode Penelitian | Temuan Utama | Lokasi Penelitian | Implementasi Kebijakan | Perbedaan |
|---|--------------------|-------------------|--|---|--|--|
| Transformasi pelayanan publik di era digital: menuju pelayanan masa depan yang lebih baik | Luki Natika (2024) | Metode kualitatif | Hasil dari jurnal ini menunjukkan bahwa transformasi Di era digital, pelayanan publik Indonesia telah mengalami banyak perubahan, termasuk peningkatan | Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Subang | Proses pelayanan diharapkan menjadi lebih efisien, mengurangi birokrasi yang berbelit-belit, serta meningkatkan efektivitas dalam memenuhi kebutuhan masyarakat. | Pada penelitian Luki Natika ini cenderung memiliki ruang lingkup umum dan membahas transformasi pelayanan publik secara menyeluruh sedangkan |

| | | | | | | |
|--|--|-------------------|---|---|--|---|
| | | | aksesibilitas, efisiensi, efektifitas, transparansi, dan akuntabilitas. | Pemerintah perlu menyusun regulasi dan kebijakan yang lebih responsif terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) serta kebutuhan masyarakat akan layanan digital. Hal ini penting untuk mengatasi lambannya regulasi yang ada saat ini. | penelitian kami memiliki ruang lingkup yang lebih spesifik, yakni pelayanan publik yang dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dispenduk Capil). | |
| Transformasi Digital Pemerintah (Studi Kasus: Implementasi e-Government dan Hambatannya) | Fitrah Eka Susilawati, Rosmalah Yanti, Erni (2023) | Metode kualitatif | Hasil dari jurnal ini menunjukkan bahwa implementasi e-government di Indonesia menghadapi berbagai tantangan, termasuk lambannya regulasi, rendahnya integrasi data, penggunaan teknologi usang, dan kurangnya kompetensi TIK di kalangan aparatur. | Universitas Cokroaminotno Palopo, Indonesia | Pemerintah perlu menyusun regulasi dan kebijakan yang lebih responsive terhadap kemajuan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), bersama dengan peningkatan kebutuhan masyarakat akan layanan digital. Hal ini penting untuk mengatasi lambannya regulasi yang ada saat ini. | |
| Transformasi digital partisipasi publik dalam proses pembuatan kebijakan | Eka Wahyu Hidayat (2024) | Metode kualitatif | Initiatif Pemerintah Digital: Pemerintah Indonesia telah menerapkan berbagai inisiatif digital seperti e-KTP, SP4N, SiMAYA, Jakarta Smart City, e-Procurement, dan SPBE untuk | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jayabaya | Diharapkan bahwa semua lapisan masyarakat, tanpa memandang latar belakang sosial ekonomi, memiliki akses yang setara terhadap platform digital yang digunakan untuk partisipasi publik, sehingga tidak ada | Pada penelitian Eka Wahyu Hidayat ini berfokus pada digitalisasi partisipasi masyarakat dalam proses politik dan pengambilan keputusan publik sedangkan penelitian kami |

| | | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|---|
| | | | meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi layanan publik. | | kelompok yang terpinggirkan. | ini berfokus pada bagaimana transformasi digital membantu mempercepat dan mempermudah layanan administrasi seperti pembuatan KTP, KK, atau akta kelahiran. |
| Transformasi Digital dalam Tata Kelola Pemerintahan: Mewujudkan Society 5.0 yang Inklusif | Ufa Anita Afrilia, Riki Satia Muharam, dan Elly Nurlia (2024) | Metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur | Hasil dari jurnal ini menunjukkan bahwa teknologi digital dapat meningkatkan partisipasi publik dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan. Namun, terdapat tantangan terkait privasi data dan akses teknologi. Penelitian ini menekankan perlunya kebijakan adaptif dan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat untuk memastikan manfaat transformasi digital dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat. | Fakultas Hukum, Ilmu Sosial, dan Ilmu Politik Universitas Terbuka | Dalam era digitalisasi, harapan akan perlindungan data pribadi dan privasi masyarakat menjadi sangat penting. Diharapkan adanya regulasi yang ketat untuk melindungi informasi sensitif dari penyalahgunaan. | Pada penelitian Ufa Anita Afrilia Muharam, dan Elly Nurlia ini bertujuan menciptakan pemerintahan yang lebih inklusif, efisien, dan berorientasi pada Society 5.0 dengan mengedepankan teknologi tinggi yang mengintegrasikan dunia fisik dan digital untuk meningkatkan kualitas hidup manusia secara holistik sedangkan penelitian kami Berfokus pada digitalisasi layanan publik di instansi spesik yaitu Dispenduk Capil. |
| Pemanfaatan teknologi dalam tata kelola pemerintahan | Muhtar Haboddin, Ratnaningsih | Metode kualitatif dengan | Pemanfaatan Teknologi dalam Pemerintahan terutama selama | Prodi Ilmu Pemerintahan -Univ Brawijaya | Diharapkan dapat terbentuknya komunikasi yang lebih baik antara | Penelitian Muhtar Haboddin, Ratnaningsih |

| | | | | | | |
|---|--|---|---|---|---|---|
| Damayanti (2021) | pendekatan studi literatur | pandemi Covid-19, telah mengubah cara kerja pemerintah daerah dalam memberikan layanan publik, memperpendek birokrasi, meningkatkan transparansi, dan membangun komunikasi yang lebih baik antara pemerintah dan warga. | pemerintah dan warga, di mana masyarakat dapat dengan mudah menyampaikan aspirasi, kritik, dan saran melalui platform digital. | Damayanti berfokus pada penggunaan teknologi secara umum dan menyeluruh di berbagai aspek tata kelola pemerintahan seperti sistem manajemen internal, komunikasi antar lembaga, pengelolaan data, hingga transparansi dan akuntabilitas publik. | | |
| Transformasi Digital dalam Administrasi Publik dan Dampaknya terhadap Kesadaran Politik Ekonomi: Analisis Pendekatan Kualitatif dalam Connected Community | Tekat Sukomardojo, Ryan Aldiansyah Akbar, Zaenal Aripin, Fakhry Amin, Endang Fatmawati | Metode kualitatif | Jurnal ini mengungkapkan bahwa integrasi teknologi informasi dan komunikasi yang maju meningkatkan kesadaran politik ekonomi dengan memfasilitasi keterlibatan masyarakat yang lebih luas melalui platform digital. | Politeknik Penerangan Surabaya, Indonesia. | Transformasi digital diharapkan dapat meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi ekonomi dan kebijakan pemerintah, sehingga meningkatkan kesadaran politik ekonomi. | Pada penelitian Tekat Sukomardojo ini berfokus pada penelitian ini lebih berfokus pada implementasi strategi digital di dalam Kementerian Keuangan, Sedangkan penelitian kami ini menekankan pada dampak transformasi digital terhadap kesadaran politik ekonomi masyarakat |
| Strategi Transformasi Digital dalam Tata Kelola Pemerintahan: Studi pada Kementerian Keuangan | Samuel Pardamean Manik, Vishnu Juwono | Metode kualitatif | Hasil dari jurnal ini menunjukkan bahwa Kementerian Keuangan Republik Indonesia telah mengimplementasi kan strategi | Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Indonesia | Diharapkan bahwa dengan implementasi strategi transformasi digital, kualitas layanan publik dapat meningkat secara | Pada penelitian Transformasi Digital Dalam Pelayanan Publik di Dispenduk Capil lebih berfokus pada pengelolaan data |

| | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|--|
| | | | transformasi digital melalui berbagai inisiatif strategis yang berfokus pada integrasi teknologi dan budaya data. Transformasi ini bertujuan untuk meningkatkan kinerja kementerian, efisiensi, dan kualitas layanan publik. | | signifikan. Ini termasuk percepatan proses pembuatan kebijakan dan peningkatan akses masyarakat terhadap informasi dan layanan pemerintah. | kependudukan untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan kepada masyarakat, sementara itu, strategi transformasi digital di Kementerian Keuangan lebih menekankan pada modernisasi sistem keuangan negara. |
| Tata kelola pemerintahan kolaboratif dalam penanganan konflik di kabupaten mesuji | Danang Bintoro, Sampara Lukman, Kusworo | Metode deskriptif dengan pendekatan induktif | Kolaborasi antara Pemerintah Kabupaten Mesuji dengan PT Silva Inhutani dalam penanganan konflik melibatkan berbagai pihak dan bertujuan untuk menyelesaikan masalah melalui program kemitraan. Meskipun ada beberapa faktor pendukung, seperti sumber daya manusia dan komunikasi yang baik, program ini belum sepenuhnya efektif, dengan hanya tujuh kelompok mitra yang terbentuk dalam tujuh tahun. | Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, Indonesia. | Penerapan konsep collaborative governance dalam penanganan konflik di Mesuji perlu ditingkatkan melalui audit, pemindahan warga, dan perbaikan pola kemitraan. | Pada penelitian Samuel ini berfokus pada strategi transformasi digital di Kementerian Keuangan lebih menekankan pada modernisasi sistem keuangan negara, sedangkan penelitian kami ini lebih berfokus pada pengelolaan data kependudukan untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan kepada masyarakat, |
| Penerapan model tata kelola digital pada pelayanan publik daring | Eko Prasetyo, Thita M. Mazy, Nissa Nurimani | Metode kualitatif deskriptif | Pelayanan daring di Pemerintah Kota Cilegon masih menghadapi berbagai | Kota Cilegon, Indonesia. | Diharapkan pelayanan publik daring dapat terintegrasi dalam satu platform yang | Pada penelitian Transformasi digital dalam pelayanan publik di Dispenduk |

| | | | | | | |
|---|---------------------------------------|-----------------------------------|---|--|---|---|
| | | | tantangan, termasuk kurangnya penyebaran informasi layanan publik dan masalah aksesibilitas pada website. Model tata kelola digital yang diterapkan saat ini bersifat satu arah (broadcasting) dan tidak efektif dalam menggunakan model-model lain seperti Critical Flow, Comparative Analysis, Mobilization and Lobbying, atau Interactive Service. | | komprehensif, sehingga memudahkan akses dan interaksi antara pemerintah dan masyarakat. | Capil berfokus pada peningkatan efisiensi dan aksesibilitas layanan administrasi kependudukan melalui teknologi, seperti sistem online untuk pengurusan dokumen. Sedangkan, penerapan model tata kelola digital pada pelayanan publik daring lebih menekankan integrasi dan interoperabilitas sistem untuk meningkatkan transparansi dan responsivitas layanan publik secara keseluruhan. |
| Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government) dan Pembangunan Berkelanjutan: Reviu Literatur Sistematis | Faturachman Alputra Sudirman1, Saidin | Metode Reviu Literatur Sistematis | E-government memiliki dampak signifikan terhadap pembangunan berkelanjutan melalui peningkatan tata kelola pemerintahan yang baik, pengendalian korupsi, dan efektivitas manajemen pemerintahan. Ini termasuk kemudahan akses layanan dan | Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Halu Oleo | Meski demikian, implementasi e-government juga diharapkan mengatasi berbagai hambatan, seperti ketersediaan infrastruktur TI yang kurang memadai, keterbatasan anggaran, kapasitas sumber daya manusia, serta dukungan pemerintah yang efektif. | Transformasi digital dalam pelayanan publik di Dispenduk Capil berfokus pada pengembangan sistem administrasi kependudukan yang lebih efisien dan mudah diakses oleh masyarakat. Sementara itu, pemerintahan berbasis elektronik (E- |

| | | | | | |
|--|--|------------------------|--|---------------------------------|--|
| | | | partisipasi masyarakat yang lebih baik, terutama di negara berkembang. | | Government) dan pembangunan berkelanjutan menekankan penggunaan teknologi informasi untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam semua aspek pelayanan publik. |
| Transformasi digital, pelayanan publik Di masa pandemi | Fadhli Junaidi1 (2021) | Metode kualitatif | Pandemi Covid-19 telah menjadi pemicu percepatan transformasi digital dalam pelayanan publik, di mana pemerintah di seluruh dunia, termasuk Indonesia, terpaksa mengadopsi teknologi digital untuk menghadapi tantangan yang ditimbulkan oleh pembatasan sosial dan penguncian fasilitas fisik; hal ini mendorong inovasi dalam penyediaan layanan yang lebih efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat | Universitas Negeri Padang | diharapkan transformasi digital dapat memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi pelayanan publik di Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. |
| Penerapan transformasi digital pada pelayanan publik di badan pengelola | Novliza Eka Patrisia 1)* , Faizal Anwar2), Astri Dwi S. 3) (2021) | Metode sharing data | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu telah menerapkan teknologi informasi dalam | Provinsi Bengkulu | Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Bengkulu telah menggunakan teknologi informasi untuk mengelola |

| | | | | | |
|---|--|---|--|--|--|
| keuangan provinsi bengkulu | pengelolaan data untuk pelayanan publik, namun masih menghadapi beberapa kendala. | data pelayanan publik dengan baik. Program dan aplikasinya sesuai dengan struktur data pelayanan internal. Meskipun demikian, karyawan pengolah data masih membutuhkan bantuan dari pengembang software. | diterapkan dalam konteks pengelolaan keuangan publik. Sedangkan penelitian kami ini lebih spesifik pada implementasi transformasi digital dalam layanan administrasi kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | |
| Analisis faktor transformasi digital pelayanan publik pemerintah di era pandemi | Sari Sisilianingsih *1 , Betty Purwandari2 , Imairi Eitiveni3 , Mardiana Purwaningsih 4 (2019) | Metode penelitian kuantitatif Pengaruh Profesionalisme Profesionalisme dalam pelayanan publik terbukti memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap transformasi digital. Indikator profesionalisme yang diukur mencakup inovasi, keterampilan, dan pengalaman kerja. | Universitas Indonesia, Depok | Penting untuk membangun dan memperbaiki infrastruktur teknologi informasi yang mendukung layanan publik. Hal ini mencakup integrasi aplikasi dan sistem informasi yang efisien untuk memfasilitasi akses dan penggunaan layanan digital oleh masyarakat. | Penelitian Sari ini berfokus pada identifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat proses transformasi digital dalam pelayanan publik selama pandemi COVID-19. Sedangkan penelitian kami ini lebih spesifik pada implementasi transformasi digital dalam layanan administrasi kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. |
| Upaya meningkatkan kualitas layanan | Ani Yunaningsih1 , Diani Indah2 , Fajar | Upaya untuk meningkatkan kualitas layanan publik melalui | Kelurahan Cikawao Kota Bandung Kecamatan | Pelatihan memasukkan data ke big data dan menyimpan di cloud. | Penelitian Ani ini berfokus pada strategi dan langkah-langkah |

| | | | | | | |
|--|--|--|---|---|--|---|
| publik melalui digitalisasi | Eryanto Septiawan ³ (2021) | digitalisasi di Cikawao, Bandung, dengan penekanan pada pentingnya digitization dan digitalization untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi biaya, dan memperbaiki penyampaian layanan | Lengkong Kota Bandung | Pendampingan penggunaan media sosial sebagai sarana informasi publik. | yang diambil untuk meningkatkan kualitas layanan publik secara umum melalui digitalisasi. Sedangkan penelitian kami ini lebih spesifik pada penerapan transformasi digital dalam layanan administrasi kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. | |
| Transformasi Digital dalam Pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM): Studi Kasus Kirlantas Polri | Rifta Dimas Sulistiyo ¹ Muhammad Rifki Shihab ² (2023) | Metode pendekatan kualitatif | Proses pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM) di Indonesia telah mengalami transformasi digital dengan peluncuran aplikasi SIM Nasional Presisi (SINAR) yang memungkinkan perpanjangan SIM secara daring. | Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia | aplikasi SINAR memungkinkan masyarakat untuk melakukan perpanjangan SIM secara daring tanpa harus datang ke kantor pelayanan seperti kantor Satpas, SIM Keliling, maupun gerai. | Penelitian Rifta ini berfokus pada analisis transformasi digital yang dilakukan oleh Kirlantas Polri dalam pelayanan SIM. Sedangkan penelitian kami ini lebih spesifik pada implementasi transformasi digital dalam layanan administrasi kependudukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil. |
| Transformasi Digital Desa Melalui Sistem Informasi Desa (SID): Meningkatkan | Erwin Mardinata ¹ , Tomy Dwi Cahyono ² , Reza | Metode pendekatan partisipatif | Kegiatan pengabdian masyarakat di Desa Semamung melibatkan pelatihan | Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Teknologi Sumbawa | Pelatihan dan Pendampingan Tim pengabdian melakukan pelatihan kepada pegawai desa mengenai | Transformasi digital dalam pelayanan publik di Dispenduk Capil berfokus pada |

| | | | | | | |
|---|---|--|--|---|---|---|
| Kualitas Pelayanan Publik dan Kesejahteraan Masyarakat | Muhammad Rizqi 3 (2023) | penggunaan Sistem Informasi Desa (SID) untuk meningkatkan pemahaman pegawai desa dan masyarakat. | penggunaan SID, termasuk penginputan data dan pembuatan laporan. Pendampingan ini bertujuan untuk memastikan pegawai desa dapat menggunakan sistem dengan efektif dan efisien. | pengembangan sistem administrasi kependudukan yang lebih efisien, seperti penerapan Identitas Kependudukan Digital (IKD) untuk mempermudah akses layanan bagi masyarakat. Sebaliknya, transformasi digital desa melalui Sistem Informasi Desa (SID) menekankan pada pemberdayaan masyarakat desa dengan menyediakan akses informasi dan layanan publik yang lebih baik. | | |
| Pendekatan resolusi konflik di era digital: strategi untuk lembaga pendidikan | Aprilia Prisinta R. I 1 Miki Keliata2 Puput Trinaila3 Maharani 4 (2024) | Metode analisis kualitatif | digitalisasi dapat mempercepat eskalasi konflik melalui penyebaran informasi yang tidak terkendali, tetapi juga menyediakan alat efektif untuk deteksi dini, komunikasi yang lebih transparan, dan mediasi berbasis teknologi. | Institut Agama Islam Negeri Sorong, Indonesia | teknologi dalam resolusi konflik di lembaga pendidikan mencakup penggunaan platform komunikasi digital yang aman, pelatihan keterampilan literasi digital untuk tenaga pendidik dan siswa, serta pengembangan kebijakan institusional yang mendukung resolusi konflik berbasis data dan teknologi | Transformasi digital dalam pelayanan publik di Dispenduk Capil berfokus pada peningkatan efisiensi dan aksesibilitas layanan administrasi kependudukan melalui teknologi, seperti sistem online untuk pengurusan dokumen. Di sisi |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|--|

| | | | | | | |
|--|--|------------------------------|--|--------------------------------------|--|--|
| Pemberdayaan dan Pendampingan Masyarakat Desa dalam Transformasi Digital Pelayanan Publik Berbasiskan Website | Ari Sulistyanto ¹ , Pagi Muhamad ^{2*} , Dwinarko ³ , Ta brani Sjafrizal ⁴ (2022) | Metode literature review | Hasil dari jurnal ini yaitu, membahas transformasi digital di Desa Ponggang untuk meningkatkan pelayanan publik. Penelitian menunjukkan bahwa masyarakat dan aparatur desa memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya platform digital. Melalui program sosialisasi, desain website, dan pelatihan, desa berhasil meluncurkan situs web sebagai fasilitas pelayanan publik. | Universitas Bhayangkara Jakarta Raya | diharapkan melibatkan tahapan-tahapan yang sistematis, termasuk sosialisasi, perencanaan, produksi, dan pelatihan. Dengan demikian, aparatur desa dan warga dapat memahami dan menggunakan platform digital untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik. | Transformasi digital dalam pelayanan publik di Dispenduk Capil berfokus pada pengembangan sistem administrasi kependudukan yang lebih efisien dan mudah diakses oleh masyarakat. Sementara itu, pemberdayaan dan pendampingan masyarakat desa dalam transformasi digital pelayanan publik berbasis website menekankan pada partisipasi aktif masyarakat dalam proses digitalisasi. |
| Manifestasi Konsep Demokrasi Digital Dalam Tata Kelola Pemerintahan di Jakarta: Studi Kasus Pemanfaatan Platform “Jakarta Kini (JAKI)” Sebagai Wadah Aspirasi Masyarakat | Revo Linggar Vandito 1,* ; Artanti Paramesti 2 Muhamad Ali Vardan Aminudin 3 , Lia Wulandari 4 (2023) | Metode Penelitian Kualitatif | Hasil dari jurnal ini membahas tentang penerapan demokrasi digital melalui platform "Jakarta Kini" (JAKI) oleh Pemprov DKI Jakarta. JAKI bertujuan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik dalam pemerintahan. | Jakarta | Diharapkan juga bahwa peningkatan literasi digital dapat mengurangi kesenjangan digital yang ada, dengan memberikan kesempatan yang sama bagi semua lapisan masyarakat untuk mengakses informasi dan layanan publik. | Transformasi digital dalam pelayanan publik di Dispenduk Capil berfokus pada pengembangan sistem administrasi kependudukan yang efisien dan mudah diakses oleh masyarakat. Di sisi lain, manifestasi konsep demokrasi digital dalam tata kelola |

| | | | | | | |
|---|---|------------------------------|--|------------------------------------|---|--|
| | | | | | | pemerintahan di Jakarta, melalui platform "Jakarta Kini (JAKI)", berfokus pada partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan dan penyampaian aspirasi. |
| Tren penelitian literasi digital (digital literacy) tahun 2012-2022: sebuah pendekatan bibliometrik | Annisa Rahmadanita ¹ * , Enjang Hidayat ² (2023) | Metode paradigma kuantitatif | Hasil dari jurnal ini mengidentifikasi tren dan karakteristik publikasi terkait literasi digital dari 2012 hingga 2022 menggunakan pendekatan bibliometrik. Hasil menunjukkan peningkatan tahunan dalam publikasi di jurnal Scopus, dengan 3.996 kata kunci yang dikelompokkan menjadi sembilan kluster. | Institut Pemerintahan Dalam Negeri | diharapkan hasil analisis bibliometrik ini dapat memberikan wawasan bagi peneliti dan pembuat kebijakan untuk fokus pada topik-topik yang masih kurang diteliti, seperti pendidikan komputasi dan kecerdasan buatan, guna memenuhi tuntutan era digital | penelitian Annisa Rahmada nita Enjang Hidayat lebih teoretis, bertujuan untuk memahami bagaimana literasi digital berkembang sebagai bidang studi sedangkan penelitian kami konteksnya lebih aplikatif, langsung berhubungan dengan implementasi teknologi dalam pelayanan masyarakat. |
| Peran sistem pemerintah berbasis elektronik (SPBE) dalam meningkatkan aksesibilitas pelayanan publik di indonesia | Laili Choirunnisa ¹ , Try Hajar Caesar Oktaviana ² , Ahmad Ainur Ridlo ³ , Elva Imeldatur Rohmah ⁴ (2023) | Metode penelitian deskriptif | Temuan utama pada artikel tersebut mencakup prinsip dan karakteristik pelayanan publik yang harus memenuhi kejelasan, ketepatan waktu, keamanan, tanggung jawab, kenyamanan, dan kemudahan akses. | UIN Sunan Ampel Surabaya | Dengan adanya SPBE, diharapkan hambatan fisik dan geografis yang selama ini menjadi kendala dalam mendapatkan layanan publik dapat diminimalisir, sehingga masyarakat, termasuk yang berada di daerah terpencil, dapat mengakses layanan | Penelitian Laili Choirun nisa ini mengambil pendekatan makro dan nasional, dengan tujuan untuk mengevaluasi kebijakan SPBE sebagai sistem yang mencakup berbagai sektor pemerintahan dan layanan public |

| | | | | | | |
|--|--|-------------------|--|--------------------------------|--|---|
| | | | | | secara online dengan mudah. | sendangkan penelitian kami ini bersifat mikro dan praktis, dengan fokus pada bagaimana transformasi digital diterapkan dalam satu instansi tertentu untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. |
| The Effectiveness of Using Learning Device Information Systems in Preparing Learning Plans | Rohita1 Nadhifah Rahmadini Hidayat2 (2023) | Metode deskriptif | Hasil dari jurnal ini menyebutkan bahwa Sistem Informasi Perangkat Pembelajaran (SIPP) terbukti efektif dan efisien dalam membantu pendidik anak usia dini dalam menyusun rencana pelajaran. | Universitas Al Azhar Indonesia | Harapan dari penggunaan SIPP adalah agar setiap pendidik dapat lebih mudah dan efisien dalam merancang rencana pembelajaran yang berkualitas. Dengan sistem yang terintegrasi dan mudah diakses, diharapkan guru dapat menghemat waktu dan tenaga, sehingga mereka dapat lebih fokus pada proses pengajaran dan interaksi dengan anak-anak | Pada penelitian Rohita Nadhifah Rahmadini Hidayat Berfokus pada implementasi sistem informasi dalam bidang pendidikan, khususnya untuk membantu guru atau tenaga pendidik dalam menyusun rencana pembelajaran sedangkan penelitian kita berfokus pada transformasi digital di sektor pelayanan publik, khususnya pada pelayanan administrasi kependudukan yang diberikan oleh Dispenduk Capil, seperti pembuatan KTP, KK, dan akta kelahiran. |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|----------------------------------|---|--|
| Problems and Solutions for Cash Waqf Collection in Indonesia: Analytical Hierarchy Process Approach | Muhammad Fathrul Quddus , Hilda Manoarfa, Suci Aprilliani Utami (2022) | Metode deskriptif | Hasil dari jurnal ini menyebutkan tentang penghimpunan wakaf tunai di Indonesia tidak dioptimalkan, terutama karena kurangnya digitalisasi dalam proses tersebut. Meningkatkan profesionalitas nazir (pengelola wakaf) menjadi solusi yang diprioritaskan. | Universitas Pendidikan Indonesia | penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya dan menjadi acuan bagi para pemangku kebijakan dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk mendukung penghimpunan wakaf, sehingga dapat berkontribusi terhadap pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Indonesia. | Penelitian Muham Fathrul Quddus berfokus pada strategi untuk meningkatkan penghimpunan dana wakaf tunai dengan menggunakan pendekatan AHP, yang relevan dengan bidang filantropi Islam sedangkan penelitian kami berfokus pada implementasi teknologi digital untuk meningkatkan efisiensi pelayanan administrasi di satu instansi pemerintah lokal. |
| Pemerintahan e-government indonesia (pegii) dan pemanfaatan teknologi informasi di dki jakarta | Lely P.D. Tampubolon (2016) | Metode penelitian kuantitatif kualitatif | Hasil dari jurnal tersebut menyebutkan bahwa DKI Jakarta telah berhasil meningkatkan pemeringkatan e-Government di Indonesia dari peringkat ketiga pada tahun 2012 menjadi peringkat pertama selama dua tahun berturut-turut (2014-2015) melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK). | DKI JAKARTA | Harapan terhadap implementasi E-Government di Jakarta adalah untuk menciptakan pelayanan publik yang lebih efisien, cepat, dan transparan, sehingga masyarakat dapat merasakan manfaat langsung dari teknologi informasi | berfokus pada pemerintahan e-government yang mencakup seluruh implementasi sistem pemerintahan berbasis elektronik (e-Government) di Indonesia, dengan penekanan pada Pemprov DKI Jakarta sedangkan penelitian kami berfokus pada transformasi digital dalam satu instansi pemerintah lokal, |

yaitu Dispenduk Capil, untuk meningkatkan layanan administrasi kependudukan, seperti pembuatan KTP, KK, dan akta kelahiran, dengan tujuan khusus untuk meningkatkan efisiensi dan kepuasan masyarakat.

III. METODE

Studi ini menyelidiki bagaimana pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil) berubah menjadi digital. Metode ini dipilih karena memungkinkan peneliti mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data dari berbagai sumber literatur yang relevan. Dimulai dengan menentukan topik penelitian dan masalah yang akan dibahas, seperti bagaimana transformasi digital dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik di Dukcapil. Pada titik ini, peneliti membuat pertanyaan penelitian untuk membantu mencari literatur lebih lanjut.

Setelah menyusun masalah, langkah berikutnya adalah mencari informasi tentang subjek melalui jurnal ilmiah, artikel, dan buku yang relevan. Kata kunci seperti "transformasi digital", "pelayanan publik", dan "Dukcapil" digunakan untuk melakukan pencarian ini. Selanjutnya, data yang dikumpulkan dievaluasi untuk memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan benar dan dapat diandalkan. Selain itu, peneliti memperhatikan tahun publikasi untuk memastikan bahwa literatur yang digunakan mengikuti kemajuan terkini dalam bidang ini.

Selanjutnya, peneliti melihat dan memahami informasi yang mereka kumpulkan. Fokus utama dari literatur sebelumnya diidentifikasi selama analisis. Selain itu, tujuan analisis adalah untuk menemukan hubungan antara berbagai komponen yang mempengaruhi transformasi digital dalam pelayanan publik. Peneliti juga mengamati kesulitan Dukcapil saat menggunakan TIK untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan. Hasil analisis ini diharapkan memberikan wawasan mendalam tentang keadaan saat ini dan rekomendasi untuk perbaikan.

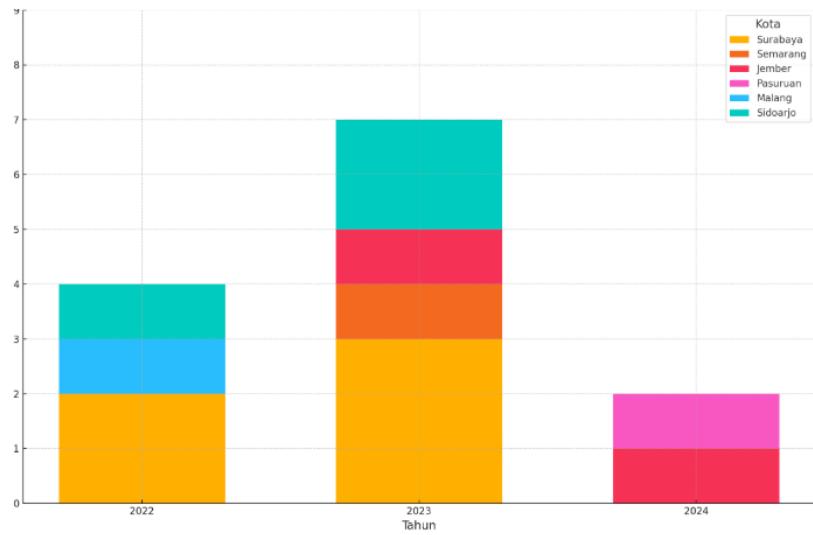
Penelitian ini bertujuan untuk menyimpulkan hasil dari tinjauan literatur yang dilakukan. Temuan yang diperoleh akan mencakup ringkasan mengenai faktor-faktor yang menghalangi dan mendukung transformasi digital di Dukcapil, serta rekomendasi mengenai

pemanfaatan teknologi digital untuk meningkatkan kualitas layanan publik. Peneliti juga akan mempertimbangkan tantangan yang dihadapi Dukcapil dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan. Analisis ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih mendalam tentang kondisi saat ini serta saran untuk perbaikan.

IV. TEMUAN

Pada penelitian kami yang berjudul “TRANSFORMASI DIGITAL DALAM PELAYANAN PUBLIK DI DISPENDUK CAPIL” ditemukan beberapa kata kunci yakni transformasi digital, pelayanan public, dispenduk capil, administrasi kependudukan, inovasi digital. Ditemukan 200 jurnal pendukung dengan menggunakan sistem literatur review dengan bantuan publish or perish. Tetapi setelah dilakukan review pada setiap jurnal yang sesuai dengan kata kunci hanya ditemukan beberapa jurnal yang tepat untuk memperkuat hasil tinjauan kami, hasil review jurnal yang cocok terlampir dibawah ini:

1. “transformasi digital” dari total 35 jurnal dari 200 pencarian jurnal yang ditemukan, terdapat 10 jurnal yang sesuai dan relevan dengan penelitian ini.
2. “pelayanan public” dari total 35 jurnal dari 200 pencarian jurnal yang ditemukan hanya 8 jurnal yang relevan dan mendukung penelitian terkait transformasi digital dalam pelayanan public.
3. “dispenduk capil” dari total 35 jurnal dari 200 pencarian jurnal yang ditemukan hanya 6 jurnal yang relevan dan mendukung penelitian terkait transformasi digital dalam dispenduk capil.
4. “Administrasi kependudukan” dari total 35 jurnal dari 200 pencarian jurnal yang ditemukan hanya 6 jurnal yang relevan dan mendukung penelitian terkait transformasi digital dalam administrasi kependudukan.
5. “inovasi digital” dari total 35 jurnal dari 200 pencarian jurnal yang ditemukan hanya 6 jurnal yang relevan dan mendukung penelitian terkait transformasi digital dalam inovasi digital.



Transformasi digital dalam pelayanan publik di Dispenduk capil sebagai respons terhadap kebutuhan efisiensi, transparansi, dan aksesibilitas layanan administrasi kependudukan yang lebih baik. Di Indonesia, penerapan teknologi informasi dalam Dispendukcapil, seperti aplikasi E-KTP, e-akte, dan sistem administrasi berbasis online, berfungsi untuk mempercepat proses pelayanan, mengurangi birokrasi, serta meningkatkan akurasi data kependudukan. Anggapan ini mencerminkan keyakinan bahwa digitalisasi dapat menyederhanakan prosedur yang sebelumnya memakan waktu lama dan membutuhkan kehadiran fisik, sehingga memungkinkan masyarakat untuk mengakses layanan dengan lebih mudah dan cepat.

V. PEMBAHASAN

Pelayanan publik yang diberikan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil telah berubah secara digital, dan ini dipengaruhi oleh Dispenduk Capil. Kebijakan pemerintah yang mendukung penggunaan teknologi dalam administrasi kependudukan merupakan komponen utama yang mempengaruhi proses ini. Kebijakan seperti penerapan e-KTP dan berbagai aplikasi administrasi kependudukan mempercepat pelayanan masyarakat dengan cara yang lebih efektif dan mudah diakses. Namun, ada masalah dengan keberlanjutan kebijakan ini, terutama dalam hal pemeliharaan sistem, yang membutuhkan perhatian lebih untuk memastikan bahwa sistem digital dapat beroperasi dengan lancar dalam jangka panjang.

Sebaliknya, peraturan yang mendasari transformasi digital sudah cukup jelas dan kadang-kadang menunjukkan perbedaan antara pemerintah pusat dan daerah tentang bagaimana menerapkannya. Pergeseran aturan di tingkat daerah seringkali memperlambat perkembangan digitalisasi. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk menyelaraskan

kebijakan dan regulasi agar implementasi sistem digital di seluruh wilayah dapat optimal, dan ini harus didukung oleh seluruh tingkat pemerintahan.

Transformasi digital di Dispenduk Capil juga berpengaruh pada aspek ekonomi, di mana digitalisasi terbukti dapat mengurangi biaya operasional jangka panjang. Namun, biaya awal yang terkait dengan pengembangan infrastruktur digital dan pelatihan SDM masih menjadi hambatan yang perlu diatasi. Untuk itu, penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk menemukan sumber dana yang tepat dan memastikan anggaran yang cukup untuk mendukung proses digitalisasi yang lancar.

Dalam hal budaya, digitalisasi tidak selalu mudah, terutama dalam hal sebagian masyarakat yang tidak menyukai teknologi. Pelatihan dan sosialisasi sangat penting karena banyak masyarakat belum familiar dengan teknologi. Dibutuhkan upaya intensif untuk mendekatkan masyarakat dengan teknologi, seperti melalui program pendidikan dan pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan digital masyarakat agar mereka dapat memanfaatkan layanan digital dengan baik.

Terakhir, keberhasilan transformasi digital sangat dipengaruhi oleh faktor lingkungan, terutama infrastruktur teknologi dan kesiapan daerah. Pemerataan infrastruktur di seluruh wilayah diperlukan untuk memastikan bahwa setiap daerah memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses dan memanfaatkan pelayanan publik berbasis digital. Ini tidak mungkin terjadi di beberapa daerah dengan akses internet yang terbatas atau infrastruktur yang tidak memadai.

Secara keseluruhan, meskipun transformasi digital di Dispenduk Capil memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas pelayanan publik, tantangan yang ada harus ditangani dengan baik. Untuk mempercepat pengembangan infrastruktur digital, pemerintah harus memperkuat kebijakan yang ada, membuat regulasi yang lebih fleksibel, dan meningkatkan kerja sama antara sektor publik dan swasta. Jika diterapkan dengan benar, digitalisasi pelayanan publik dapat berdampak positif dan merata di seluruh daerah.

VI. KESIMPULAN

Studi ini menemukan bahwa penggunaan teknologi digital dalam pelayanan publik di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (juga dikenal sebagai Dispenduk Capil) memiliki potensi besar untuk meningkatkan efisiensi, transparansi, dan kemudahan akses ke layanan administrasi kependudukan. Dispenduk Capil dapat mempercepat proses pelayanan, mengurangi birokrasi, dan meningkatkan akurasi data kependudukan dengan menggunakan teknologi informasi seperti e-KTP, e-akte, dan sistem administrasi online. Meskipun demikian, transformasi digital menghadapi banyak masalah. Ini termasuk ketidaksesuaian kebijakan antara pemerintah pusat dan daerah, kekurangan infrastruktur, resistensi terhadap perubahan budaya organisasi, dan rendahnya literasi digital masyarakat.

Pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama untuk menyelaraskan kebijakan dan peraturan terkait transformasi digital agar sistem dapat digunakan secara optimal di seluruh wilayah. Selain itu, digitalisasi mungkin mengurangi biaya operasional dalam jangka

panjang, tetapi biaya awal pengembangan infrastruktur dan pelatihan SDM masih menjadi masalah utama yang harus diatasi. Oleh karena itu, sangat penting bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk memastikan ketersediaan dana yang cukup untuk mendukung proses digitalisasi yang lancar.

Selain itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan literasi digital masyarakat melalui program pelatihan dan pendidikan yang intensif agar transformasi digital dapat berjalan dengan sukses. Hal ini akan membuat masyarakat lebih mudah mendapatkan layanan digital dan memanfaatkan teknologi secara efektif. Untuk memastikan bahwa setiap warga negara dapat merasakan manfaat dari layanan publik berbasis digital, diperlukan infrastruktur yang memadai dan akses internet yang merata di seluruh wilayah.

Secara keseluruhan, transformasi digital dalam pelayanan publik di Dispenduk Capil dapat berdampak positif bagi seluruh masyarakat Indonesia, meskipun tantangan yang ada tidak bisa diabaikan. Ini dapat dicapai dengan kebijakan yang tepat, dukungan anggaran yang memadai, dan kolaborasi antara sektor publik dan swasta. Diharapkan bahwa transformasi ini akan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan membantu tercapainya tujuan pembangunan nasional yang lebih inklusif dan berkelanjutan.

Ucapan Terimakasih

Dengan penuh rasa hormat dan terima kasih, saya ingin menyampaikan penghargaan yang mendalam kepada Bapak Dr. IFFAN GALLANT EL MUHAMMADY S.Sos.M.Si, dosen pembimbing, atas semua bimbingan, arahan, dan dukungan yang sangat berarti selama proses penulisan artikel ini. Dengan bimbingan bapak, saya telah memperoleh pemahaman dan wawasan yang sangat berharga, yang telah memperkaya artikel ini dan meningkatkan kemampuan akademis saya. Semoga segala kebijakan Anda dibalas dengan sewajarnya, dan semoga kami dapat terus bekerja sama dengan hasil yang baik di masa depan. Terima kasih atas waktunya.

References

- Afrilia, U. A., Muharam, R. S., & Nurlia, E. (2024, November). Transformasi Digital dalam Tata Kelola Pemerintahan: Mewujudkan Society 5.0 yang Inklusif. In Seminar Nasional Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Vol. 1, pp. 524-533).
- Anangkota, M. (2017). Klasifikasi Sistem Pemerintahan. CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan, 3(2), 148-152.
- Atmaja, S. (2024). Pemanfaatan Artificial Intelligence (AI) Dalam Transformasi Digital Untuk Pelayanan Publik. Jurnal Manajemen dan Bisnis, 6(1), 9-21.
- Choirunnisa, L., Oktaviana, T. H. C., Ridlo, A. A., & Rohmah, E. I. (2023). Peran Sistem Pemerintah Berbasis Elektronik (SPBE) Dalam Meningkatkan Aksesibilitas Pelayanan Publik di Indonesia. Sosio Yustisia: Jurnal Hukum dan Perubahan Sosial, 3(1), 71-95.

- Habodin, M., & Damayanti, R. (2021). Pemanfaatan Teknologi dalam Tata Kelola Pemerintahan. *Prosiding Senaspolhi*, 3(1).
- Hidayat, E. W. (2024). Transformasi Digital Partisipasi Publik Dalam Proses Pembuatan Kebijakan. *Jurnal Studi Interdisipliner Perspektif*, 23(2), 221-232.
- Hidayat, N. R. (2023). The Effectiveness of Using Learning Device Information Systems in Preparing Learning Plans. *Jurnal Pendidikan Usia Dini*, 17(1), 155-172.
- Junaidi, F. (2021). Transformasi Digital, Pelayanan Publik Di Masa Pandemi. *Ekasakti Educational Journal*, 1(2), 278-292.
- Manik, S. P., & Juwono, V. (2024). Strategi Transformasi Digital dalam Tata Kelola Pemerintahan: Studi pada Kementerian Keuangan. *Briliant: Jurnal Riset dan Konseptual*, 9(1), 1-16.
- Mardinata, E., Cahyono, T. D., & Rizqi, R. M. (2023). Transformasi digital desa melalui sistem informasi desa (sid): meningkatkan kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. *Parta: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 4(1), 73-81.
- Natika, L. (2024). Transformasi Pelayanan Publik Di Era Digital: Menuju Pelayanan Masa Depan Yang Lebih Baik. *The World of Public Administration Journal*, 6(1), 1-11.
- Noviati, C. E. (2013). Demokrasi dan sistem pemerintahan. *Jurnal Konstitusi*, 10(2), 333-354.
- Patrisia, N. E., & Anwar, F. (2021). Penerapan transformasi digital pada pelayanan publik di badan pengelola keuangan provinsi beNGKULU. *Mimbar: Jurnal Penelitian Sosial Dan Politik*, 10(1), 24-33.
- Prasetyo, E., Mazyia, T. M., & Nurimani, N. (2023). Penerapan Model Tata Kelola Digital Pada Pelayanan Publik Daring. *Jurnal Governansi*, 9(2), 81-94.
- Quddus, M. F., Manoarfa, H., & Utami, S. C. (2022). Problems and Solutions for Cash Waqf Collection in Indonesia: Analytical Hierarchy Process Approach. *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 9(5), 710-730.
- Rahmadanita, A., & Hidayat, E. (2023). Tren Penelitian Literasi Digital (Digital Literacy) Tahun 2012-2022: Sebuah Pendekatan Bibliometrik. *Jurnal Teknologi dan Komunikasi Pemerintahan*, 5(2), 188-207.
- Sisilianingsih, S., Purwandari, B., Eitiveni, I., & Purwaningsih, M. (2024). Analisis Faktor Transformasi Digital Pelayanan Publik Pemerintah Di Era Pandemi. *Jurnal Teknologi Informasi dan Ilmu Komputer*, 10(4), 883-892.
- Sudirman, F. A., & Saidin, S. (2022). Pemerintahan Berbasis Elektronik (E-Government) dan Pembangunan Berkelanjutan: Reviu Literatur Sistematis: Reviu Literatur Sistematis. *Nakhoda: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 21(1), 44-58.
- Sukomardojo, T., Akbar, R. A., Aripin, Z., Amin, F., & Fatmawati, E. (2023). Transformasi Digital dalam Administrasi Publik dan Dampaknya terhadap Kesadaran Politik Ekonomi: Analisis Pendekatan Kualitatif dalam Connected Community. *Ministrate: Jurnal Birokrasi dan Pemerintahan Daerah*, 5(2), 196-204.

- Sulistyanto, A., Muhamad, P., Dwinarko, D., & Sjafrizal, T. (2022). Pemberdayaan dan Pendampingan Masyarakat Desa dalam Transformasi Digital Pelayanan Publik Berbasiskan Website. *Jurnal Pengabdian Masyarakat (Abdira)*, 2(3), 117-128.
- Sulistiyo, R. D., & Shihab, M. R. (2023). Transformasi Digital dalam Pelayanan Surat Izin Mengemudi (SIM): Studi Kasus Korlantas Polri. *Technomedia Journal*, 8(2 Special Issues), 189-204.
- Susilawati, F. E., Yanti, R., & Erni, E. (2023). Transformasi Digital Pemerintah (Studi Kasus: Implementasi e-Government dan Hambatannya). *Journal Social Society*, 3(2), 80-94.
- Susilo, D., & Roesli, M. (2018). Konsep Pemerintahan Indonesia Menurut UUD 1945. *Mimbar Yustitia: Jurnal Hukum Dan Hak Asasi Manusia*, 2(1), 112-129.
- Syahfitri, C. N., Setiawan, I., & Putri, N. K. (2021). Penerapan sistem pemerintahan indonesia. *Jurnal Ilmiah Administrasi Pemerintahan Daerah*, 13(1), 49-59.
- Vandito, R. L., Paramesti, A., Aminudin, M. A. V., & Wulandari, L. (2023). Manifestasi Konsep Demokrasi Digital Dalam Tata Kelola Pemerintahan di Jakarta: Studi Kasus Pemanfaatan Platform “Jakarta Kini (JAKI)” Sebagai Wadah Aspirasi Masyarakat. *Jurnal Reinventing*, 5(2), 70-84.
- Yani, A. (2018). Sistem Pemerintahan Indonesia: Pendekatan Teori dan Praktek Konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 12(2), 119.
- Yunaningsih, A., Indah, D., & Septiawan, F. E. (2021). Upaya meningkatkan kualitas layanan publik melalui digitalisasi. *Altasia Jurnal Pariwisata Indonesia*, 3(1), 9-16.